

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab ini penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan dari para peneliti sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Dwi Martani dkk (2012:4) menyatakan bahwa:

“Akuntansi adalah bahasa bisnis (*business language*), akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa mendatang.”

Pengertian akuntansi menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:1) yaitu sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna laporan keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan eksternal.”

Sedangkan pengertian akuntansi menurut Mursyidi (2010:17) berpendapat bahwa:

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisaan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh pihak yang menggunakannya dengan mudah dan dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan yang lainnya.

2.1.1.2 Proses Akuntansi

Menurut Mursyidi (2010:18) bahwa tahapan dalam proses akuntansi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan (*Recording*) transaksi-transaksi keuangan

Pada tahap ini setiap transaksi keuangan dicatat secara kronologis dan sistematis dalam periode tertentu di dalam sebuah atau beberapa buku yang disebut jurnal. Setiap catatan itu harus ditunjang oleh dokumen dan sumbernya (nota, faktur, kwitansi, bukti memorial dan lain-lain). Pencatatan dalam akuntansi ada dua tahap, yaitu pencatatan transaksi dalam buku jurnal (*journal entry*) dan pencatatan ayat jurnal ke buku besar (*posting to ledger*).

2. Pengelompokkan (*Classification*)

Pada tahap ini menunjukkan aktivitas transaksi-transaksi yang sudah dicatat itu dikelompokkan menurut kelompok akun yang ada, yaitu kelompok akun asset (*assets*), akun kewajiban (*liabilities*), akun ekuitas (*equity*), akun

pendapatan (*revenue*) dan akun beban (*expense*).

3. Pengikhtisaran (*Summarizing*)

Pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan nilai untuk setiap akun yang disajikan dalam bentuk saldo masing-masing sisi debit dan kredit, bahkan hanya berupa saldo saja. Berarti bahwa secara berkala semua transaksi yang sudah dicatat, dikelompokkan, disajikan secara singkat dalam daftar tersendiri yang disebut neraca saldo (*trial balance*).

4. Pelaporan (*Reporting*)

Pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan ringkasan dari hasil peringkasan. Laporan disusun secara sistematis untuk dapat dipahami dan dapat diperbandingkan serta disajikan secara lengkap (*full disclosure*). Laporan keuangan terdiri atas laba rugi (*income statment*), laporan perubahan ekuitas (*equity statement*), laporan neraca (*balance sheet*), laporan arus kas (*cash flow statement*), dan catatan atas laporan keuangan.

5. Penafsiran (*Analizing*)

Tahap ini merupakan lanjutan dari proses akuntansi secara teknis, yaitu membaca laporan keuangan melalui alat dan formula tertentu sehingga dapat diketahui kinerja dan posisi keuangan dan perubahannya untuk suatu organisasi.

Jadi proses akuntansi meliputi pencatatan transaksi-transaksi keuangan, pengelompokkan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan.

2.1.1.3 Tujuan Akuntansi

Menurut Mursyidi (2010:19), “tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2009:3) menyatakan bahwa:

“Tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi atau perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak di dalam perusahaan maupun pihak luar perusahaan”.

Jadi tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi laporan keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal.

2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.1.2.1 Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi informasi pada saat ini sangat berperan dalam mendukung kegiatan suatu organisasi agar kegiatan organisasi tersebut bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi dan merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Menurut Abdul Kadir dan Triwahyuni (2013:2) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah:

“Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi”.

Menurut Sutarman (2012:13), definisi dari teknologi informasi yaitu sebagai berikut:

“Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer”.

Sedangkan menurut Tata Sutabri (2012:3) menyatakan bahwa definisi teknologi informasi sebagai berikut:

“Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.”

Dari beberapa definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi berbasis komputer untuk mengolah data menjadi informasi yang berkualitas sehingga berguna untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi mencakup gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Komputer sebagai perangkat keras dengan *software-software* sebagai perangkat lunak yang berfungsi untuk sarana pengolahan maupun penyimpanan data yang nantinya dikirimkan melalui saluran telekomunikasi.

2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Teknologi Informasi

Menurut Sutarman (2012:17) mengemukakan tujuan dari teknologi informasi yaitu:

1. Untuk memecahkan masalah
2. Untuk membuka kreativitas
3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan

Terdapat enam fungsi dari teknologi informasi menurut Sutarman (2012:18)

yaitu sebagai berikut:

1. Menangkap (*Capture*)
2. Mengolah (*Processing*)
3. Menghasilkan (*Generating*)
4. Menimpan (*Storage*)
5. Mencari kembali (*Retrieval*)
6. Transmisi (*Transmission*)

Adapun penjelasan lebih rinci dari fungsi teknologi informasi menurut

Sutarman (2012:18) yaitu:

1. Menangkap (*Capture*)

Mengkompilasi catatan rinci dari aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic dan sebagainya.

2. Mengolah (*Processing*)

Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi, pengolahan atau memproses data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala bentuk data dan informasi.

- a. *Data Processing*, memproses dan mengolah data menjadi suatu informasi.
- b. *Information Processing*, suatu aktivitas komputer yang memproses dan mengolah suatu tipe atau bentuk dari informasi dan mengubahnya menjadi tipe atau bentuk dari informasi.

- c. *Multimedia System*, suatu sistem komputer yang dapat memproses berbagai tipe atau bentuk dari informasi secara bersamaan.
3. Menghasilkan (*Generating*)
Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Misalnya: laporan, table, grafik, dan sebagainya.
 4. Menyimpan (*Storage*)
Merekam atau menyimpan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya disimpan ke *harddisk*, *tape*, *disket*, *compact disc* (CD) dan sebagainya.
 5. Mencari kembali (*Retrieval*)
Menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin (*copy*) data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya.
 6. Transmisi (*Transmission*)
Mengirimkan data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya mengirimkan data penjualan dari *user* A ke *user* lainnya dan sebagainya.

2.1.2.3 Peran Teknologi Informasi

Menurut Abdul Kadir (2014:12) menyatakan bahwa peranan teknologi informasi yaitu:

1. Teknologi informasi menggantikan peran manusia.
Dalam hal ini, teknologi melakukan otomatis terhadap suatu tugas atau proses.
2. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.

3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi memberi kontribusi bagi organisasi yang menerapkannya. Teknologi informasi juga dapat membantu memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

2.1.2.4 Pengelompokkan Teknologi Informasi

Menurut Haag (2000) yang dikutip oleh Abdul Kadir (2014:11) membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok, yaitu:

1. Teknologi Masukan (*Input Technology*)
2. Teknologi Keluaran (*Output Technology*)
3. Teknologi Perangkat Lunak (*Software Technology*)
4. Teknologi Penyimpanan (*Storage Technology*)
5. Teknologi Komunikasi (*Telecommunication Technology*)
6. Mesin Pemrosesan (*Processing Machine*)

Adapun penjelasan dari pengelompokkan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. Teknologi masukan (*Input technology*)

Segala perangkat yang digunakan untuk mengangkat data atau informasi dari sumber aslinya.

2. Teknologi keluaran (*Output technology*)

Supaya informasi bisa diterima oleh pemakai yang membutuhkan, informasi perlu disajikan dalam monitor. Namun kadangkala pemakai menginginkan informasi yang tercetak dalam kertas (*hardcopy*). Pada keadaan seperti ini, printer berperan dalam menentukan kualitas cetakan.

Dewasa ini, terdapat berbagai peran yang mendukung penyajian informasi, termasuk dalam suara.

3. Teknologi perangkat lunak (*Software technology*)

Untuk menciptakan informasi dibutuhkan perangkat lunak atau seringkali disebut program. Program adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer.

4. Teknologi penyimpanan (*Storage technology*)

Teknologi penyimpanan menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data.

5. Teknologi komunikasi (*Telecommunication technology*)

Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh.

6. Mesin pemroses (*Processing machine*)

Mesin pemroses adalah bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau program (berupa komponen/memori) dan mengeksekusi program (berupa komponen CPU).

2.1.2.5 Komponen Teknologi Informasi

Menurut Jogiyanto Hartono (2011:13) dalam pengenalan komputer, mengklasifikasikan komponen teknologi informasi sebagai berikut:

“Elemen-elemen dari *system computer* adalah *software*, *hardware* dan *brainware*”.

Sedangkan menurut Abdul Kadir (2014:28) bahwa teknologi informasi memiliki lima komponen penting, yaitu:

1. *Hardware* (Perangkat Keras)
Hardware adalah istilah umum yang merujuk pada bagian-bagian fisik dari sebuah teknologi.
2. *Software* (Perangkat Lunak)
Perangkat lunak adalah sekelompok item atau objek yang membentuk “konfigurasi” di mana didalamnya termasuk program, dokumen dan data.
3. *Brainware* (Manusia)
Brainware adalah istilah yang digunakan untuk manusia yang berhubungan dengan sistem komputer.
4. *Procedure* (Prosedur)
Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, prosedur penting dimiliki bagi setiap organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada saat prosedur telah diterima oleh semua pihak dan sesuai dengan situasi serta kondisi yang ada, maka prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu fungsi tertentu, dengan adanya prosedur yang memadai maka pengendalian dapat dilakukan dengan baik.
5. *Communication Network* (Jaringan Komunikasi)
Jaringan komunikasi saat ini menghubungkan beberapa daratan dan lautan untuk memindahkan data dalam jumlah besar, esensi dari telekomunikasi adalah pengurangan waktu dan ruang akses terhadap data di suatu lokasi tidak lagi tergantung kepada dimensi lokasi tersebut berada, saat ini komunikasi satelit menggantikan saluran komunikasi kabel dan serat optik, kelihatannya strategi”.

2.1.2.6 Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Triadis (1980:5) dalam HL Geovannie (2016:3) mengemukakan bahwa:

“Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengetahuan seseorang dilingkungan yang dapat dipengaruhi oleh perasaan individu terhadap penggunaan komputer, faktor sosial dilingkungan tempat kerja yang menggunakan komputer, kebiasaan individu saat menggunakan komputer, konsekuensi yang dirasakan individu yang diharapkan dari pengguna komputer, dan kondisi yang memfasilitasi dalam lingkungan kondusif yang menggunakan komputer dan alat teknologi lainnya”.

Menurut Thompson *et al* (1991) dalam Irine Chintya (2015:3):

“Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan”.

Menurut Jogiyanto (1995) dalam Fadila Ariesta (2013:6) pemanfaatan teknologi informasi sebagai berikut:

“Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku karyawan teknologi dengan tugasnya, pengukuran berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang digunakan”.

2.1.2.7 Pengukuran Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Jurnal dan Supomo (2002) dalam Santiadji Mustafa (2010)

Konstruksi pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan indikator:

1. Perangkat

Elemen atau pondasi penting untuk membangun sebuah komputer yang memiliki fungsionalitas dan berguna bagi manusia. Perangkat merupakan dimensi untuk menggambarkan kelengkapan yang mendukung hardware dan sistem jaringan internet.

- a). Hardware, merupakan peralatan fisik yang digunakan untuk mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengelolaan data dalam bentuk informasi.
 - Contoh alat masukan (*input*) yaitu keyboard, mouse, scanner, touch screen, kamera digital
 - Contoh alat proses yaitu RAM (Random Access Memory), mainboard, kartu suara
 - Contoh alat simpan yaitu CD/DVD room, flasdisk, disket, optical disk
 - Contoh alat keluaran (*output*) yaitu monitor, printer, speaker, proyektor LCD
- b). Jaringan internet, sebuah jaringan yang terkait dalam lingkup global dan memfasilitasi komunikasi layanan data.

2. Pengelolaan Data Keuangan

Basis teknologi informasi yang didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan referensi, serta proses komunikasi data/informasi keuangan. pengelolaan data keuangan merupakan dimensi untuk menggambarkan:

- a). Komputerisasi proses akuntansi, sebuah sistem akuntansi dimana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan.
- b). Software yang digunakan seperti Microsoft Office.
- c). Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi, menghasilkan laporan akuntansi dan manajerial berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi.

3. Perawatan

Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur terhadap perangkat teknologi informasi guna mendukung kelancaran pekerjaan. Perawatan merupakan dimensi untuk menggambarkan:

- a). Pemeliharaan peralatan, melakukan pemeliharaan peralatan secara teratur
- b). Perbaikan peralatan yang rusak/hilang, melakukan pendataan dan perbaikan pada peralatan yang hilang/rusak

Menurut Thompson *et al* (1991) dalam HL Geovannie (2016:7), pengukuran pemanfaatan teknologi informasi sebagai berikut:

1. “Intensitas pemanfaatan (*intensity of use*)
2. Frekuensi pemanfaatan (*frequency of use*)
3. Jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan (*diversity of software package used*).

Adapun penjelasan pengukuran pemanfaatan teknologi informasi menurut penjelasan lain adalah sebagai berikut:

1. Intensitas pemanfaatn (*intensity of use*)
Menurut Ardi Hamzah (2009) dalam Irma Yuni Kurnia (2015:31), “Minat (*intention*) atau intensitas pemanfaatan yang tinggi terhadap penggunaan teknologi sistem informasi akan menumbuhkan perilaku yang menunjang pemanfaatan teknologi sistem informasi”.
2. Frekuensi pemanfaatan (*frequency of use*)
Menurut Siti Taufik Muntianah dkk. (2012) dalam Irma Yunia Kurnia (2015:31), “Pengukuran penggunaan sesungguhnya (*actual use*) diukur sebagai jumlah waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan suatu teknologi dan besarnya frekuensi penggunaannya”. Menurut Argo Wikanjati dalam Kamus Bahasa Indonesia (2012) frekuensi adalah

“Jumlah kejadian yang lengkap atau fungsi muncul dalam suatu waktu: pada bidang elektronik, biasanya mengacu pada banyaknya gelombang yang diulangi per detik, diukur dalam hertz, banyaknya objek dalam suatu kategori”.

3. Jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan (*diversity of software package used*)

Menurut Agus Mulyanto (2009: 88) Irma Yuni Kurnia (2015:32), perangkat lunak aplikasi adalah program yang ditulis oleh manusia untuk melakukan tugas-tugas atau memecahkan masalah tertentu. Perangkat lunak aplikasi masih dibedakan menjadi dua jenis yaitu, program aplikasi umum dan program aplikasi khusus. Program aplikasi umum merupakan program yang melakukan tugas atau pemrosesan secara umum bagi para pengguna akhir, misal pengolah kata, *spreadsheet*, DBMS, *e-mail sender*, *web browser*, dan lain sebagainya. Sedangkan program aplikasi khusus adalah program yang secara khusus digunakan untuk mendukung aplikasi khusus untuk para pemakai seperti aplikasi untuk bisnis, aplikasi untuk pendidikan, aplikasi multimedia, dan aplikasi lainnya yang digunakan sesuai dengan bidangnya.

Menurut Jogiyanto dan Abdillah (2010), pemanfaatan teknologi informasi pada sebagian besar perusahaan saat ini bukan lagi menjadi barang langka yang sulit ditemukan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa teknologi informasi telah menjadi kebutuhan sekaligus persyaratan bagi organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Teknologi informasi sangat dibutuhkan organisasi untuk membantu mencapai tujuannya, namun pengadaan teknologi informasi membutuhkan investasi yang besar. Investasi teknologi informasi yang sudah dikeluarkan perusahaan harus dapat dijalankan dengan maksimal. Teknologi informasi pada organisasi tidak cukup hanya diatur (*manage*) oleh bagian teknologi informasi saja, tetapi harus dikelola (*govern*) secara profesional. Pengelolaan teknologi informasi yang profesional disebut sebagai tata kelola teknologi informasi (*IT Governance*).

2.1.2.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Investasi organisasi pada teknologi informasi membutuhkan dana yang

besar dan beresiko. Untuk membuat keputusan yang lebih formatif, maka pengembangan sistem perlu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja individu menurut Triadis (1980:28) dalam HL Geovannie (2016:3), yaitu:

1. Konsekuensi yang dirasakan (*Perceived Consequences*)
didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh dimasa datang, seperti peningkatan fleksibilitas, merubah pekerjaan atau peningkatan kesempatan bagi pekerjaan yang lebih berarti.
2. Faktor Sosial (*Social Factors*)
diartikan sebagai internalisasi individu dari referensi kelompok budaya subyektif (norma, peran, dan nilai-nilai) dan mengkhususkan persetujuan antar pribadi bahwa individu telah berusaha dengan yang lain pada situasi sosial khusus.
3. Perasaan Individu (*Affect*)
diartikan mengacu pada emosi murni, sukacita, kegembiraan, kesenangan, depresi, ketidaksukaan, ketidakpuasan, atau kebencian yang berhubungan dengan individu tertentu dalam pemanfaatan teknologi informasi.
4. Niat (*Intention*)
sejauh mana seorang individu bersedia untuk mencoba dan berinovasi dalam mengerahkan pekerjaannya untuk menggunakan teknologi informasi.
5. Kebiasaan (*Habit*)
menjelaskan pada perilaku yang telah menjadi otomatis dan rutin berulang-ulang dalam kegiatan individual menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja individual dalam melaksanakan tugas.
6. Kondisi yang Memfasilitasi (*Facilitating Condition*)
didefinisikan sebagai faktor obyektif di dalam lingkungan yang memudahkan pemakai dalam bertindak/bekerja”.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Setiap organisasi publik maupun non-publik diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Laporan keuangan tersebut harus mengacu pada standar yang berlaku serta memenuhi karakteristik

yang berkualitas. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 30-32), laporan keuangan pemerintah merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara serta para gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan daerah adalah suatu pernyataan entitas pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode (Nordawan, dkk 2012). Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dikelola. Laporan keuangan yang diterbitkan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain.

Dalam penyajian laporan keuangan, harus disadari bahwa banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan tersebut. Salah satu tujuannya adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat dipahami dan dapat digunakan oleh pemakai dan pemakai dapat mempercayai informasi tersebut. Bermanfaat atau tidaknya informasi hanya dapat ditentukan secara kualitas dalam

hubungannya dengan keputusan pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi yang disajikan tersebut.

Menurut Indra Bastian (2010:9) pengertian kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan sehingga mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan perusahaan.

Menurut Mahmudi (2016:13) mendefinisikan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholder* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.”

Menurut Hery (2012:2) mendefinisikan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.”

Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan:

“Laporan keuangan daerah adalah kesesuaian berdasarkan standar yang dapat diukur serta dicapai melalui suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

2.1.3.2 Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”

Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuias pemerintah daerah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendabai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah, dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar-generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan atau ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus atau defisit-laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan kas suatu entitas pelaporan. Dengan adanya penjelasan dari PP no 71 tahun 2010 yang menyatakan:

“CaLK pada dasarnya dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah dapat dipahami secara keseluruhan oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun pemerintah saja. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pengguna maupun pembaca laporan keuangan pemerintah, dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan setiap entitas pelaporan (pemerintah) menambah atau mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam CaLK, selama perubahan tersebut tidak mengurangi ataupun menghilangkan substansi informasi yang harus disajikan.”

Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan memahami tujuan, manfaat dan isi/pos-pos dari setiap komponen laporan keuangan, rakyat sebagai pengguna laporan keuangan akan lebih mudah menilai kinerja Pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Rakyat dapat mengetahui jumlah dan sumber dana yang dipungut/dikumpulkan oleh pemerintah dalam setiap periodenya, bagaimana pengelolaannya, termasuk dapat menelusuri lebih jauh penggunaan dana masyarakat tersebut serta mengevaluasi sejauhmana capaian dari setiap program/kegiatan pemerintah.

Informasi yang ada dalam laporan keuangan juga akan berguna untuk mengetahui jumlah serta jenis-jenis aset maupun utang yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga kinerja pemerintah dapat teridentifikasi secara jelas dan rakyatpun dapat memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja pemerintah tersebut. Dalam kenyataannya, meskipun laporan keuangan sudah bersifat general purposive atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca/pengguna dapat memahami laporan keuangan pemerintah

dengan baik, akibat perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Untuk itu, agar pengguna dapat menginterpretasikan seluruh informasi-informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan secara tepat maka diperlukan hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah.

2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menyatakan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen tersebut sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan keuangan

Berikut adalah penjelasan secara rinci dari masing-masing laporan keuangan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi dalam satu periode pelaporan dan juga

mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Unsur-unsur penyajian dalam LRA adalah:

a. Pendapatan LRA

Pendapatan LRA merupakan semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

c. Transfer

Transfer merupakan penerimaan atas pengeluaran dari satu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Surplus/defisit LRA

Surplus/defisit LRA merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja yang ada dalam LRA selama satu periode.

e. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang perlu diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal ini terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)

SILPA/SIKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

g. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun dan menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

- a) Saldo Anggaran Lebih
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
- d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e) Lain-lain, dan
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir

Selanjutnya rincian unsur-unsur dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih terdapat pada catatan atas laporan keuangan.

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Unsur-unsur yang terdapat dalam neraca meliputi:

a) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah daerah dari peristiwa/kejadian masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan. Aset tersebut diklasifikasikan kedalam aset lancar dan aset tidak lancar.

b) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

c) Ekuitas

Dihasilkan dari selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan yang merupakan kekayaan bersih pemerintah.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO dan beban operasional, surplus/deficit non operasional, pos luar biasa, dan surplus/deficit LO.

- a. Pendapatan LO merupakan hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.
- c. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
- d. Kegiatan non operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin.
- e. Surplus/deficit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan atau pengurangan surplus/deficit dari kegiatan operasional dengan kegiatan non operasional.
- f. Pos luar biasa merupakan pendapatan/beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau operasi yang tidak biasa, tidak diharapkan sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- g. Surplus/defisit LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan dan setelah diperhitungkan dengan surplus/defisit dari kegiatan non operasional serta pos luar biasa.

4. Laporan Arus Kas

LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas serta kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

- a. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.
- b. Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
- c. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan, baik dalam jumlah maupun komposisi utang dan piutang jangka panjang.
- d. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan seperti penerimaan/pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari:

- a. Ekuitas awal
 - b. Surplus/deficit-LO pada periode bersangkutan
 - c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - d. Ekuitas akhir
6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya

- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
- f. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, dan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.3.4 Pengguna Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat.
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.
3. Pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
4. Pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Mengingat laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh 35 ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintah serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, namun apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

2.1.3.5 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengemukakan bahwa:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.”

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Adapun penjelasan dari keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan di atas adalah:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi keputusan pengguna dengan membantu mereka

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang data mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan

dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian dan Referensi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siska Yulia Defitri (2016)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota di Kota Solok.	Persamaannya terletak pada variabel independen yaitu pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi serta variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu penelitian sebelumnya dilakukan pada wilayah Kota Solok, sedangkan penulis melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bandung.
2.	Nilam Sari (2016)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi,	Hasil pengujian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, penerapan SAP, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem penengendalian	Persamaannya terletak pada variabel independen yaitu pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi serta variabel dependen yaitu kualitas	Perbedaannya terletak pada variabel independen yaitu kapasitas sumber daya manusia, penerapan SAP dan sistem pengendalian intern, sedangkan penulis hanya

		<p>Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bungo.</p>	<p>laporan keuangan.</p>	<p>memiliki 2 variabel independen serta objek penelitiannya.</p>
3.	Aniftahudin (2016)	<p>Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Teknologi</p>	<p>Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada</p>	<p>Persamaannya terletak pada variabel independen yaitu pemahaman akuntansi dan teknologi informasi serta variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada variabel independen yaitu sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah serta objek penelitiannya.</p>

		Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hilir.		
4.	Meilani Purwanti dan Wasman (2014)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Bandung.	Persamaannya terletak pada variabel independen yaitu pemahaman akuntansi serta variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan.	Perbedaannya terletak pada variabel independen yaitu pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan peran internal audit serta objek penelitiannya.

5.	Siti Chodijah dan Nurul Hidayah (2018)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta.	Persamaannya terletak pada variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi serta variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan.	Perbedaannya terletak pada variabel independen yaitu sistem pengendalian internal serta objek penelitiannya.
6.	As Syifa Nurillah dan Dul Muid	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD),	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas	Persamaannya terletak pada variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi serta variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan.	Perbedaannya terletak pada variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dan sistem pengendalian intern serta objek penelitiannya.

		Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok.		
--	--	---	---	--	--

2.2 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan (pihak internal), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berguna bagi kepentingan pihak internal dan

eksternal perusahaan harus disusun secara baik dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

2.2.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

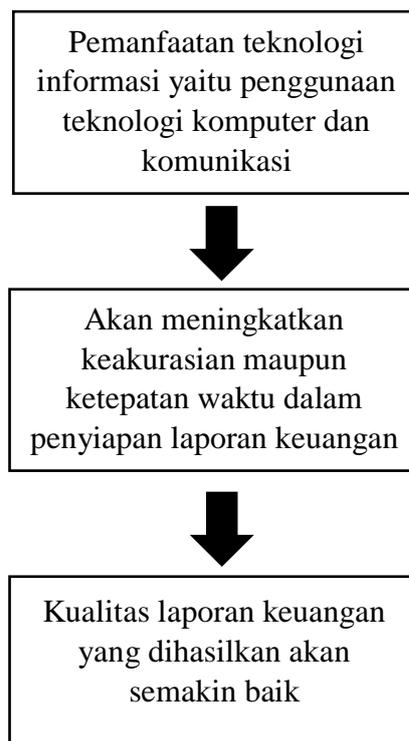
Penelitian yang dilakukan oleh Rasyidah Nadir (2017) menyimpulkan bahwa:

“Pemanfaatan teknologi informasi yaitu penggunaan teknologi komputer dan komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan keakurasian maupun ketepatan waktu dalam penyiapan laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik”.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Chodijah (2018) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ternyata menentukan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ternyata telah mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung penyajian laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif. Agar pelaporan keuangan pemerintah memenuhi karakteristik tersebut, maka perlu optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan, karena dengan adanya pemanfaatan terhadap teknologi informasi dapat mempercepat

proses pengolahan data transaksi dan mempermudah proses kerja yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyederhanakan akses antar unit dalam menyajikan suatu laporan keuangan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2014:64) berpendapat bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ = Terdapat pengaruh signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan